



ANALISA IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH MELALUI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA DESA KARANG SATRIA KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI

Siti Rahmawati¹, Cris Kuntadi², Rachmat Ptamukty³

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: siti.rahmawati19@mhs.ubharajaya.ac.id

Article History:

Received: 07-07-2023

Revised: 11-07-2023

Accepted: 14-07-2023

Keywords:

Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah,
Undang-undang
Negara.

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada setiap desa di Kecamatan Desa Karang Satria mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Kajian dilakukan dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan konsep akuntansi sumber daya manusia kemudian melakukan analisis keuangan baik terhadap laporan keuangan konvensional maupun laporan keuangan berbasis Akuntansi Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, (2) sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, (3) kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas, dan (4) aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi aparatur secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Menurut (Harmawanto & Setianto Poernomo, Yosef Cahyo Winarto, 2019) Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satuan tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Adalah Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia (Luqyana & Islahuddin, 2022)

. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan adalah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara. Adapun pengertian dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar dan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui.

Secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara priodik (SAP 2016). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis AkruaI sesuai ketentuan dalam PP nomor 71 Tahun 2010 dimana Terdapat 2 buah lampiran, Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI yang berlaku sejak tanggal dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akruaI yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akruaI hingga tahun 2014. Dengan kata lain, Lampiran II adalah Lampiran yang secara efektif melaksanakan seluruh ketentuan PP 24 Tahun 2005 tanpa sedikit pun modifikasi (Yahya, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan dan penulis merumuskan masalah pertama yang penulis temukan disini yaitu Kantor Desa Karang Satria belum menerapkan laporan arus kas sesuai dengan SAP 2016, seharusnya dalam Standar Akuntansi Pemerintah harus memiliki laporan arus yang dijelaskan pada peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 03, pernyataan standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut perundang-undangan menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas . Akibatnya sulit mengetahui informasi tentang kas dan juga tidak bisa membandingkan tentang laporan arus kas tahun ini dan tahun sebelumnya.

Masalah yang kedua yang ada didalam Kantor Desa Karang Satria yaitu belum menerapkan jurnal standar satuan kerja perangkat daerah. Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD diperbolehkan tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Namun demikian, prosedur pengganti tersebut harus dikelola dalam sebuah sistem sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam buku besar (sebagai header), neraca saldo, dan laporan realisasi anggaran.

LANDASAN TEORI

Teori Empiris (*Empirical Review*)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan akuntansi merupakan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, serta penginterpretasikan atas hasilnya. Akuntansi merupakan suatu teknik dalam bidang ekonomi yang dapat memberikan informasi terkait keputusan yang akan diambil oleh individu maupun perusahaan atau organisasi.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No. 71 tahun 2010 juga mengacu pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah. Masing-masing Kepala daerah mempunyai kewenangan mengatur dan menyusun kebijakan akuntansi yang berlaku di daerahnya dengan mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 Dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikan kepada legislatif untuk mendapat persetujuan. Untuk mewujudkan transparansi dan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam menggunakan anggaran tersebut pihak eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat melalui legislatif (Ama Febriyanti, 2022). Keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki atau dikuasai oleh Negara atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya Keuangan Negara sama dengan keuangan daerah hanya saja pada keuangan Negara meliputi pengelolaan keuangan saja. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah dan ini juga diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Seperti keuangan Negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri dari atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah dipisahkan. Keuangan daerah yang dapat dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang investaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintah daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintah daerah. Adapun indikator dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut (Indira, et al. 2020): 1. Pengakuan, 2. Pengukuran, 3. Pelaporan, 4. Pengungkapan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 Tahun 2006. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Herawati, 2017).

Laporan Keuangan

Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Rahayu, 2017:2). Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 bahwa laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



X1: Implementasi Standar Akuntansi memiliki dampak terhadap Keuangan Pemerintah

Y1 : Laporan Keuangan Pemerintah Pada Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Pada penelitian ini membahas mengenai seberapa terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, Pelaporan Keuangan Pada Kantor Desa Karang Satria. Arti secara umum dari istilah hipotesis adalah pernyataan tentatif atau sementara tentang solusi dari masalah. Hipotesis memberikan solusi dari masalah yang harus diverifikasi secara empiris atau bukti nyata berdasarkan data lapangan. Hipotesis penelitian dimaksudkan untuk dilakukan pengujian dengan fakta. Hipotesis adalah sebagai pemandu bagi peneliti untuk menjawab fenomena yang ada. Pada akhirnya sebagai pembuktian terhadap proposisi untuk diterima atau ditolak (Tarjo, 2019).

METODE PENELITIAN

Desain pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang melakukan perbandingan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang berkaitan dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian (Saebani & Sutisna, 2018).

Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah Analisa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pada Desa Karang Satria Kecamatan Tambun

Utara Kabupaten Bekasi dengan pengambilan data wawancara narasumber yang cukup ahli dalam bidang ini adalah Badan Pengurus Harian yang

terdiri dari kepala desa, sekretaris, humas, bendahara. Selain itu dilakukannya observasi dan dokumentasi sebagai dokumen pendukung dengan demikian data yang di berikan dapat dibilang valid dikarenakan narasumber dan data yang diberikan sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

Dalam melaukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Elsanda, 2022).

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi lembaga pemerintah yaitu Kementrian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik dan pengamatan langsung dari situs resmi di lokasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

APBDesa Pelaksanaan Akhir Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	JUMLAH PENDAPATAN	8.376.388.900,00
	JUMLAH BELANJA	8.380.766.564,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.377.664,00
	PEMBIAYAAN NETTC	377.664,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.376.388.900,00
	Program SAPA WARGA	19.800.000,00
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	201.986.664,00
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.661.919.300,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	400.680.600,00
.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.2207.500,00
.	Belanja Modal	147.035.600,00
.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	132.448.500,00
.	PEMERDAYAAN MASYARAKAT	472.835.000,00
.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	262.101.000,00
.	Bantuan Perikanan (Bibi/Pakar/dll)	262.101.000,00
.	Belanja Barang dan Jasa	262.101.000,00
.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	126.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	8.380.766.564,00
	TOTAL	52.146.806.820.000,00

Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Desa Karang Satria

Deskripsi Tugas (TUPOKSI)

Kepala Desa: berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sekretaris Desa: bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Kaur Umum: Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kaur Keuangan: bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kaur Perencanaan: bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kaur Pemerintahan: Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Kaur Kesejahteraan: Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasanyang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelola Keuangan.
2. Tunjangan Kesejahteraan tidak memoderasi pengaruh terhadap hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan.

3. Laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Pengelola Keuangan.

Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembahasan dan hasil kesimpulan yang diperoleh maka implikasi manajerial yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta referensi dalam keputusan melakukan penelitian terhadap Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sehingga dapat membantu mereka dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya, dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi akuntansi. Serta dapat memberikan wawasan bagi pembaca. mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya kualitas laporan keuangan dalam suatu instansi pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ade Husna, Maryam, S. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. 4(2), 206–214.
- [2] Adnyana, M. (2019). Akuntansi Manajemen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qUAKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=akuntansi&ots=GaCzhpaorV&sig=sXZIH3QP0hySct3THV3NyKsV-q8>
- [3] Ama Febriyanti, S. F. P. (2022). Optimalisasi Sistem Pengeluaran Kas Pada Dinas X Di Kabupaten Bojonegoro: Studi Kasus Hasil Pembelajaran Lapangan. 2(88), 50–64.
- [4] Anggita Fitriana, A. N. R., Widarno, B., & Harimurti, F. (2020). PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4), 649–658. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3750>
- [5] Annastasya Meisa Putri, & Irdianty, A. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional 2015-2019. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(8), 1103–1117. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i8.438>
- [6] Anugrah, A. T. (2020). Analisis Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bosowa Terhadap Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Kota Makassar. *Economics Bosowa*, 4(001), 122–134. <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/242>
- [7] Azharsyah Ibrahim. (2021). Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah: Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi,. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1).
- [8] Badan Pusat Statistik. (2020). Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2021. In *Catalog* (hal. 1–262).
- [9] Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2021. In *Catalog* (hal.

- 1–262).
- [10] Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2021. In Catalog (hal. 1–262).
- [11] Banun, K. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansipiutang Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bmtal - Ikhlas).
- [12] Bekasi, B. K. (2021). Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 1–59.
- [13] Daerah, D. (2022). KARANGSATRIA.
- [14] Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. (2020). Laporan Realisasi Anggaran.pdf (hal. 1).
- [15] Elsanda, R. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Perdagangan Dan Jasa Prima Umega Di Pekanbaru. <https://repository.uir.ac.id/12851/>
- [16] Fariruz, Z. (2020). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA “KOPERASI KARUNIA” DI YAYASAN PONDOK PESANTREN ABHARIYAH JERENENG KECAMATAN LABUAPI LOMBOK BARAT.
- [17] Jultri, A., Made, A., & Wirshandono Y., D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5449>
- [18] Karmana, D., Lesmana, B., & M, D. Z. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja Perusahaan. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 7(2), 1–9.
- [19] Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 167. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020>
- [20] Luqyana, L., & Islahuddin, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Apakah Aksesibilitas, Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Aparatur Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 83–94. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i1.21068>
- [21] Nurjanah, Y. (2020). ANALISA PENCABUTAN PSAK 27 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOPERASI.
- [22] Rima Elya Dasuk. (2019). Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus Koperasi di Jawa Barat. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 4(1), 12–26.
- [23] Sari, S. D. P. (2022). Analisis penerapan akuntansi pada puskesmas sidomulyo rawat jalan.
- [24] Sianipar, R. T., Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Pulungan, K. P. A. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirtauli Pematangsiantar. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(1), 87–95. <https://doi.org/10.37403/mjm.v6i1.155>
- [25] SukimoDS, F. U. N. Y. (2020). PENYETARAAN TES UAN: MENGAPA DAN BAGAIMANA?
- [26] Suryatmaja, I. B., Kurniari, K., Nada, I. M., & Sriartha Dewi, N. K. (2021). Analisis Efisiensi Saluran Daerah Irigasi Tinjau Menjangkau Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Sungai di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, 10(2), 81–85. <https://doi.org/10.36733/jikt.v10i2.3004>

- [27] Tanjung, G. (2020). Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Galang Tanjung, 2504, 1–9.
- [28] Yanti, A., & Nurhidayah, F. (2020). Pentingnya Pemahaman Akuntansi Sederhana Sebagai Solusi Untuk Menyusun Laporan Keuangan (Studi kasus pada UD Rian Arianto Farm). Jurnal Akuntansi, 9(2), 183–193. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi186>